

MENAVIGASI PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN BUTON: EKSPLORASI POSISI STRATEGIS-KOMPETITIFNYA DALAM PEMBANGUNAN KEPULAUAN

***NAVIGATING THE FORMATION OF PROVINCE OF BUTON ISLANDS:
EXPLORATION OF STRATEGIC-COMPETITIVE POSITION IN THE DEVELOPMENT OF
THE ARCHIPELAGO***

Herie Saksono*

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No. 132, Senen – Jakarta

Dikirim: 27 April 2020; Disetujui: 1 Juni 2020; Diterbitkan: 31 Juli 2020

DOI: [10.46891/kainawa.2.2020.1-19](https://doi.org/10.46891/kainawa.2.2020.1-19)

Inti Sari

Menavigasi pembentukan Provinsi Kepulauan Buton merupakan kontribusi pemikiran dalam upaya penguatan sekaligus memastikan ketersediaan data (*big data*) untuk mendukung pembentukan Provinsi Kepulauan Buton. Kelak, Provinsi Kepulauan Buton akan mencakup enam (6) pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pemberlakuan moratorium pemekaran daerah menjadi momentum konsolidasi, berbenah, dan melengkapi hal ihwal yang masih memerlukan penyempurnaan. Kajian ini dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur. Melalui navigasi yang tepat, dapat ditentukan arah, tujuan, dan sasaran yang mampu memperkuat argumentasi pentingnya Provinsi Kepulauan Buton. Eksplorasi posisi strategis kompetitif lebih berorientasi futuristik dengan paradigma era digital. Studi ini bersifat kualitatif menggunakan metode studi literatur yang dilakukan secara mandiri melalui pemanfaatan peluang disela-sela aktivitas kelitbangam di Kota Baubau. Studi ini bertujuan mengeksplorasi posisi strategis-kompetitif calon Provinsi Kepulauan Buton. Frasa Strategis-kompetitif dimaknai sebagai mendudukkan keberadaan Kepulauan Buton dan sumberdayanya. Hasil analisis menemukan dua kategorisasi sumberdaya, yakni: sumberdaya nyata (*tangible*) dan sumberdaya yang tidak nyata (*intangible*). Sumberdaya berwujud adalah modal yang terdiri atas 6 jenis antara lain: kewilayahan, manusia, sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi, sedangkan sumberdaya nirwujud meliputi 4 (empat) jenis yakni: kreativitas, inovasi, komunitas kreatif, dan IoT & digitalisasi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa posisi strategis-kompetitif merupakan salah satu faktor penguatan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengukuhkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton. Eksistensi sumberdaya di Kepulauan Buton mengindikasikan kesiapan sekaligus wujud garansi bahwa melalui pembentukan Provinsi Kepulauan Buton akan tercipta perubahan, kemandirian, kecepatan merespons dan perbaikan mutu layanan, kesiapan penatakelolaan kepemerintahan yang baik, dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan. Kedua pertimbangan tersebut diharapkan dapat membangun rasa percaya (*trust*) Pemerintah bahwa memang sudah layak dan sepatasnya Provinsi Kepulauan Buton segera disahkan menjadi daerah otonom baru (DOB) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kata Kunci: navigasi; pembangunan kepulauan; Kepulauan Buton; posisi strategis-kompetitif

* Penulis Korespondensi

Telepon : +62-811-8899-965

Surel : herie.saksono26@gmail.com

© 2020 Penulis



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons
Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Abstract

Navigating the formation of the Buton Islands Province is a contribution to thinking in an effort to strengthen and ensure the availability of data (big data) to support the formation of the Buton Islands Province. Later, the Buton Islands Province will cover six (6) district/city regional governments. The enactment of the regional moratorium on regional expansion has become a momentum of consolidation, improvement and complete matters that still need improvement. This study was conducted qualitatively-descriptive using the literature study method. Through proper navigation, direction, goals and targets can be determined which can strengthen the argumentation about the importance of the Buton Islands Province. Exploration of competitive strategic positions is more futuristic oriented with the paradigm of the digital age. This study is a qualitative study using a literature study method that is carried out independently through the use of opportunities in the midst of research activities in the City of Baubau. This study aims to explore the strategic-competitive position of prospective Buton Islands Province. The phrase Strategic-competitive is interpreted as seizing the existence of the Buton Islands and its resources. The analysis found two resource categories, namely: tangible resources and intangible resources. Tangible resources are capital consisting of 6 (six) types including: territorial, human, social, cultural, environmental, and economic, while intangible resources include 4 (four) types, namely: creativity, innovation, creative community, and IoT & digitization. The results of the analysis concluded that the strategic-competitive position is one of the reinforcing factors that can be taken into consideration to confirm the formation of the Buton Islands Province. The existence of resources in the Buton Islands indicates readiness as well as a form of guarantee that through the formation of the Province of the Buton Islands will create change, independence, speed of responding and improving service quality, readiness for good governance, and the sustainability of sustainable development. Both of these considerations are expected to be able to build the trust of the Government that it is indeed feasible and appropriate that the Buton Islands Province be ratified as a new autonomous region (DOB) within the framework of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI).

Keywords: *navigation; islands development; Buton Islands; strategic-competitive position*

I. PENDAHULUAN

Merealisasikan pemekaran suatu wilayah provinsi maupun kabupaten/kota merupakan suatu perjuangan yang harus dilakukan secara komprehensif, simultan, dan futuristik. Pemekaran daerah merupakan bagian dari proses pembentukan daerah dalam rangka penataan daerah. Penataan daerah merupakan mandatori desentralisasi yang terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Sudah pasti, keduanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pertimbangan kepentingan strategis nasional diberlakukan untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pembentukan daerah berupa: a) pemekaran daerah; dan b) penggabungan daerah. Pembentukan daerah yang dimaksud mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota. Sementara dalam konteks pemekaran daerah yang dimaksud adalah: a) pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru; atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Saat ini, pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota. Tentunya, pembentukan daerah persiapan tersebut menuntut terpenuhinya persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Sejauh mana prosesi pembentukan Provinsi Kepulauan Buton? Sekalipun hingga saat ini, Pemerintah masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB), hal ini merupakan peluang untuk membenahi sejumlah persyaratan pembentukan daerah otonom secara paripurna. Persyaratan dasar meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Adapun persyaratan administratif untuk daerah provinsi meliputi persetujuan Bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang

akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi dan persetujuan Bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk. Gagasan membentuk provinsi baru sebagai pemekaran dari wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara telah dirintis sejak 1994 dan mencapai puncaknya pada 1996, sehingga sampai saat ini telah menyita waktu 26 tahun. Sebuah penantian panjang yang mengakumulasikan permasalahan dengan beragam suka-duka dalam pengelolaannya. Namun, dibalik hal ihwal tersebut, terkandung kepastian yang memberikan pengharapan, mendeskripsikan cita-cita luhur nan mulia yang mengindikasikan kesabaran, kebesaran jiwa, kegigihan, dan semangat untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Buton sebagai daerah otonom.

Dalam konteks manajemen perencanaan pembangunan daerah berbasis penelitian & pengembangan dan desain & inovasi, *Saksono (2019, hlm. 214)* menyebutkan adanya 6 (enam) jenis modal pembangunan, yakni: i) modal kewilayahan (*territorial capital*); ii) modal manusia (*human capital*); iii) modal sosial (*social capital*); iv) modal kebudayaan (*cultural capital*); v) modal lingkungan/alam (*environment/natural capital*); dan vi) modal ekonomi (*economic capital*). Mengapa menggunakan pendekatan modal (*capital*)? Modal terdiri dari, menurut definisi, input yang diperlukan dalam proses ekonomi dan yang bertahan (sebagai lawan input yang digunakan pada konsumsi) agar perekonomian dapat berlanjut besok. Sebagai sebuah konsep, modal sejalan dengan aspek temporal dari pembangunan berkelanjutan. Inti dari keberlanjutan adalah bahwa produksi ekonomi terus berlanjut untuk kepentingan masa depan (bukan karena produksi secara inheren baik tetapi karena berkontribusi pada kesejahteraan manusia). Untuk melakukan ini, perlu mempertahankan alat-alat produksi — atau modal — secara utuh dari waktu ke waktu. Modal mewujudkan banyak hal yang diperlukan untuk menciptakan aliran jasa dan bahan yang diperlukan untuk produksi ekonomi, hari ini dan untuk masa depan. Jika modal dipertahankan konstan atau tumbuh seiring waktu, maka produksi ekonomi juga dapat dipertahankan seiring waktu. Argumen bahwa modal diperlukan untuk keberlanjutan

Tabel 1.

Definisi/Pengertian/Pendapat Pakar dan Institusi/Lembaga Tentang Jenis Jenis Modal Pembangunan

Jenis Modal	Pakar I	Institusi/Lembaga	Definisi/Pengertian Dalam Studi Ini
Modal Kewilayahan (<i>Territorial Capital</i>)	<i>Each region has a specific territorial capital that is distinct from that of other areas and generates a higher return for specific kinds of investments than for others, since these are better suited to the area and use its assets and potential more effectively</i> (Tóth, 2015, hlm. 2).	<i>Territorial capital refers to the stock of assets which form the basis for endogenous development in each city and region, as well as to the institutions, modes of decision-making and professional skills to make best use of those assets</i> (OECD, 2001, hlm. 13).	Modal kewilayahan adalah stok aset dan potensi lokal yang spesifik di suatu wilayah, bila dieksplorasi secara profesional dan bijak akan menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat untuk strategi pertumbuhan daerah.
Modal Manusia (<i>Human Capital</i>)	<i>Human capital relates to the processes of training, vocational education and other initiatives in order to increase knowledge, skills, abilities, values and social assets of an employee that will lead to satisfaction & employee performance, and ultimately the competitiveness of the organization</i> (Gogan, 2014, hlm. 54).	<i>Human capital is defined by the OECD as the knowledge, skills, competencies and attributes embodied in individuals that facilitate the creation of personal, social and economic well-being</i> (OECD; 2007, hlm. 29).	Modal manusia adalah pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan atribut lain yang dimiliki seseorang untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pribadi serta organisasi tempatnya berkarya.
Modal Sosial (<i>Social Capital</i>)	<i>Portes and Sensenbrenner (1993) define social capital as "those expectations for action within a collectivity that affect the economic goals and goal-seeking behavior of its members, even if these expectations are not oriented toward the economic sphere."</i> (Portes & Sensenbrenner (1993) dalam Perret (2014, hlm. 4)).	<i>The definition of social capital is: networks together with shared norms, values and understandings that facilitate co-operation within or among groups</i> (OECD, 2001, hlm. 41).	Modal sosial adalah kebersamaan secara sosial yang memengaruhi tujuan ekonomi atau untuk mencapai tujuan lainnya.
Modal Budaya (<i>Cultural Capital</i>)	<i>Cultural capital can be defined as an asset that embodies, stores or gives rise to cultural value independently of whatever economic value it may possess</i> (Towse, 2011, hlm. 143).	<i>Cultural capital is a community's embodied cultural skills and values, in all their community-defined forms, inherited from the community's previous generation, undergoing adaptation and extension by current members of the community, and desired by the community to be passed on to its next generation</i> (Dalziel dkk., 2009).	Modal budaya adalah keterampilan dan nilai-nilai budaya sebagai aset dan warisan untuk dikembangkan dalam upaya mewujudkan menyimpan atau menimbulkan nilai budaya terlepas dari nilai ekonomi apa pun yang mungkin dimiliki masyarakat.
Modal Lingkungan/Alam (<i>Environmental/Natural Capital</i>)	<i>Environmental capital - defined as the possible uses, or functions, of the environment and natural resources - provided by nature and capable of being scientifically established, should remain intact</i> (Daly (1973), Hueting (1974), Goodland (1995) dalam Huetting & Reijnders (1998, hlm. 2)).	<i>OECD statistical glossary defines natural capital as follows: Natural capital are natural assets in their role of providing natural resource inputs and environmental services for economic production. Usually the definitions of natural capital include environmental assets, as well as ecosystems</i> (Kurecik dkk., 2017, hlm. 7).	Modal lingkungan/alam adalah kemungkinan penggunaan/fungsi dari lingkungan & SDA sebagai aset yang disediakan oleh alam untuk produksi ekonomi. Modal lingkungan/alam meliputi aset lingkungan, ekosistem, & nilainya bagi masyarakat.
Modal Ekonomi (<i>Economic Capital</i>)	<i>Economic capital is the amount necessary to be in business – at a 99 percent or better level of confidence – in regard to assumed risks</i> (Chorafas, 2004, hlm. 107).	<i>Economic capital, which can be defined as the methods or practices that allow financial institutions to consistently assess risk and to attribute capital to cover the economic effects of risk-taking activities, has increasingly become an accepted input into decision-making at various levels within banking organisations</i> (Bank for International Settlements, 2009, hlm. 8).	Modal ekonomi dapat didefinisikan sebagai jumlah modal yang diperlukan untuk aktivitas pembangunan/bisnis beserta risiko ekonomi riil yang dihadapinya baik oleh Pemerintah, pemda, dan lembaga keuangan.

Sumber: Berbagai Sumber. Data diolah, 2020

produksi didasarkan pada teori ekonomi yang dengannya sebagian besar orang tidak terbiasa. Sekalipun tidak terbiasa dengan gagasan teoretis tentang modal, mereka akan memiliki perasaan intuitif tentang pentingnya modal (Smith dkk., 2001, hlm. 1).

Secara rinci, pengertian, definisi, dan pendapat yang disampaikan oleh para pakar maupun institusi/lembaga serta pandangan penulis yang akan digunakan dalam analisis studi ini diuraikan pada **Tabel 1**.

Operasionalisasi modal pembangunan di wilayah kepulauan wajib berbasis kreativitas dan inovasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan internet untuk segala (*Internet of*

Things/IoT) & digitalisasi, sehingga mempercepat tercipta kemajuan, kemandirian, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan pembentukan daerah otonom. Senada dengan itu, **Saksono (2013, hlm. 1-2)** menegaskan bahwa dalam perspektif negara kepulauan, Negara menjadi semakin sejahtera ketika para pengelolanya inovatif dalam pemanfaatan kearifan lokal berbasis kekayaan sumber daya kepulauan disertai dukungan dan partisipasi masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan dalam semua lini penyelenggaraan pembangunan kepulauan.

Kajian ini menjadi yang pertama dalam mengeksplorasi posisi strategis-kompetitif

untuk membangun wilayah kepulauan. Menavigasi alam konteks ini dimaksudkan memandu dengan mencermati posisi, kedudukan, dan sumberdayanya menuju kesiapan paripurna prosesi pembentukan Provinsi Kepulauan Buton. Kelak, dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton akan mengintroduksi peradaban baru berupa pemerintahan digital (*digital government*) yang tumbuh dan berkembang seiring dinamika kehidupan masyarakat kepulauan (*islands society & islands community*). Disinilah pentingnya sinergi, di mana pemerintahan daerah bersama para pemangku kepentingan dan masyarakatnya menjalin kolaborasi (*collaborative government*) dan membangun komitmen untuk menjadikan wilayah kepulauan sebagai hub beragam inovasi (*islands as a hub of innovations*). Tujuannya mengakselerasi perubahan fundamental menuju masyarakat yang lebih berkemampuan dan berdaya (*empower*) didukung oleh pemda yang lebih profesional dalam mengelola modal pembangunannya.

II. METODE

Artikel ini merupakan hasil observasi dan wujud refleksi pemikiran pribadi yang didedikasikan untuk membantu menavigasi, berbagi data dan analisisnya, dan dukungan informasi pengambilan keputusan bagi upaya pembentukan Provinsi Kepulauan Buton. Ruang lingkup bahasannya difokuskan kepada analisis posisi strategis-kompetitif wilayah kepulauan yang disorot dari sumberdaya kunci (*key resources*), baik sumberdaya berwujud maupun sumberdaya nirwujud. Melalui eksplorasi sumberdaya ingin diketahui keberadaan/keanekaragamannya, sehingga lebih optimum mengelolanya. Dampaknya akan mengakselerasi perubahan yang menyejahterakan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Posisi strategis-kompetitif ditinjau menurut masing-masing kabupaten/kota yang kelak akan tergabung dan menjadi satu kesatuan dalam wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Buton. Daerah tersebut adalah: i) Kabupaten Buton; ii) Kabupaten Wakatobi; iii) Kabupaten Buton Utara; iv) Kabupaten Buton Tengah; v)

Kabupaten Buton Selatan; dan vi) Kota Baubau. Memerhatikan letak geografis dan kondisi kewilayahannya, dalam studi ini digunakan istilah wilayah Kepulauan Buton untuk merepresentasikan keenam kabupaten/kotanya.

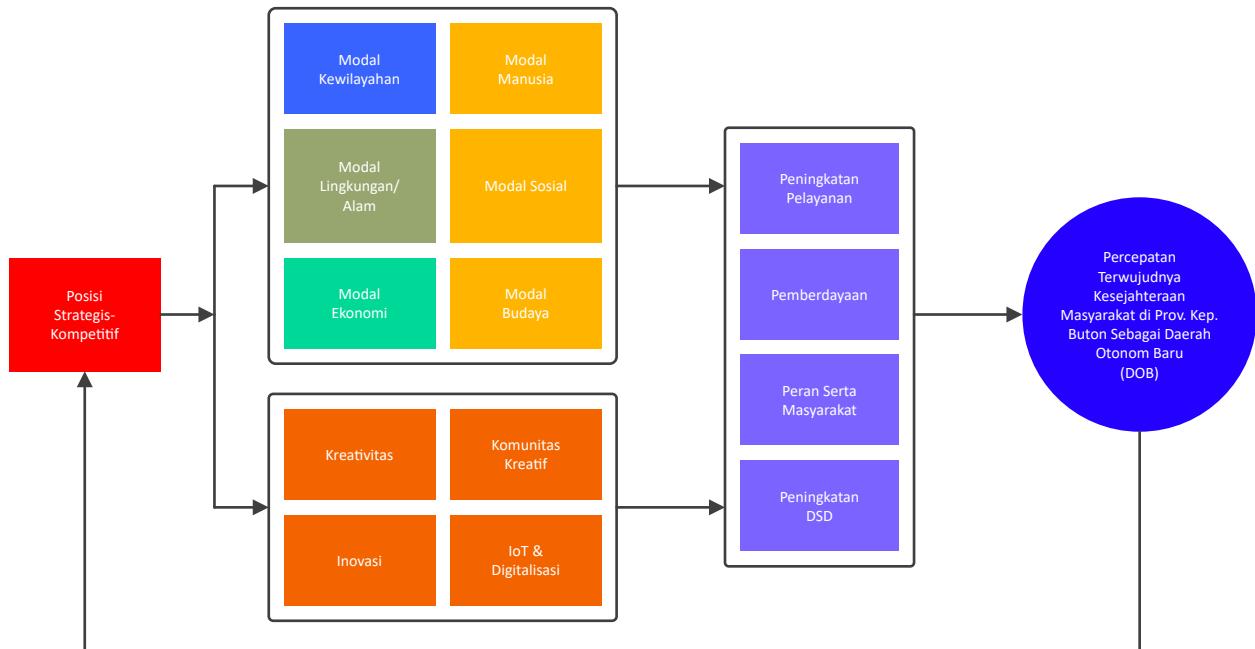
Metode yang digunakan mengeksplorasi posisi strategis-kompetitif adalah studi literatur dalam kerangka penelitian kualitatif. Posisi strategis-kompetitif ini merupakan tinjauan dari perspektif sumberdaya yang telah ada maupun yang kelak dapat dan menjadi milik Provinsi Kepulauan Buton. Dalam menganalisis data digunakan data sekunder dengan rujukan utama data/informasi/dokumentasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu diperkaya sejumlah referensi yang relevan untuk memperkuat dan mempertajam analisis dan pembahasannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksplorasi Posisi Strategis-Kompetitif

Secara astronomis, geografis, topografis, dan demografis, calon Provinsi Kepulauan Buton memiliki 2 (dua) kategori sumberdaya. Sumberdaya dimaksud adalah sumberdaya berwujud (*tangible resources*) dan sumberdaya nirwujud (*intangible resources*). Sumberdaya berwujud (*tangible*) berupa kekayaan lingkungan, kondisi alam, dan potensinya seperti bukit, dataran, lembah, hutan, sungai, air terjun, selat, perairan, laut, pantai, pulau-pulau, dan kawasan pertambangan di seluruh wilayah calon Provinsi Kepulauan Buton. Tentu saja sumberdaya berwujud ini memiliki keterbatasan potensi, sehingga diperlukan manajemen profesional untuk menjaga dan memeliharanya. Sumberdaya berwujud merupakan modal (*capital*) yang sangat penting bagi terselenggaranya pemerintahan daerah, prosesi pembangunan, dan aktivitas kemasyarakatan. Secara fisik, sumberdaya berwujud dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) jenis modal, yakni: i) modal kewilayahan (*territorial capital*); ii) modal manusia (*human capital*); iii) modal sosial (*social capital*); iv) modal kebudayaan (*cultural capital*); v) modal lingkungan (*environment capital*); dan vi) modal ekonomi (*economic capital*).

Keadaan yang kontras terdapat pada sumberdaya yang tidak nyata, di mana



Gambar 1. Posisi Strategis-Kompetitif untuk Penguatan Calon Provinsi Kepulauan Buton

keberadaannya tidak dapat langsung dilihat secara kasat mata atau dirasakan secara fisik. Sumberdaya nirwujud memerlukan proses dan waktu untuk mengaktualisasikannya. Sumberdaya nirwujud dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yakni: i) kreativitas (*creativity*) yang mencakup 16 subsektor industri kreatif; ii) inspirasi-imajinasi-inovasi, khususnya inovasi daerah (*regional innovations*); iii) komunitas kreatif (*creative communities*) dalam hal ini pelaku usaha kreatif; dan iv) IoT & digitalisasi (*digitalization*). Secara operasional kolaborasi antarpara aktor, kreator, dan inovator menjadi krusial dalam upayanya menghasilkan sinergi yang berperan mengintroduksi lahirnya kreativitas, inovasi, komunitas kreatif, produk kreatif, industri kreatif, dan kota kreatif serta membentuk ekosistem kreatif di daerah. Kini, diera digital, kreativitas/inovasi sangat dipengaruhi keberadaan internet & kualitasnya dan tata kelola digital. Keadaan ini turut membentuk ekosistem pemerintahan digital. Kinerja setiap ekosistem tersebut semakin memperkokoh keberadaan ekonomi kreatif dan inovasi sebagai talenta-talenta baru yang tak akan berkesudahan karena senantiasa terbarukan.

B. Sumberdaya Berwujud (*Tangible Resources*)

Sumberdaya berwujud di Kepulauan Buton sangat melimpah. Optimasi sumberdaya ini menggerakkan perekonomian, mengubah pola hidup masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Pemda kabupaten/kota secara kolaboratif melakukan identifikasi, inventarisasi, pemetaan, dan pemanfaatan seluruh sumberdaya berwujud tersebut agar menghasilkan nilai (*value*) untuk perubahan yang lebih baik. Dalam konteks ini, identifikasi dimaksudkan sebagai upaya menemukan berbagai potensi kekayaan alam yang telah ada di wilayah Kepulauan Buton sejak dahulu dan masih tersedia hingga saat ini. Inventarisasi merupakan upaya mendata seluruh potensi kekayaan alam baik yang keberadaannya sangat mendominasi, menjadi potensi unggulan daerah (PUD), maupun yang memiliki andil setelah dilakukan pengelolaan. Proses selanjutnya adalah pemetaan keberadaan potensi kekayaan alam menurut *locus, habitus*, sektor, dan produktivitasnya. Terakhir adalah pemanfaatan yang merupakan prosesi untuk meningkatkan nilai tambah dan komersialisasi produk, sehingga semakin jelas kemanfaatannya bagi publik, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan pendapatan per kapita, mereduksi kemiskinan, menjamin kelestarian

Tabel 2.a.

Posisi Strategis-Kompetitif Berdasarkan Modal Kewilayahannya Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

Kabupaten/Kota (Ibukota)	Dasar Hukum Pembentukan	Luas Daratan (Km ²)*	Luas Laut (Km ²)	Tinggi Wilayah (MDPL)	Jumlah					
					Pulau	Kec.	Desa	Kel.	UPT	Desa/Kel.
Buton (Pasarwajo)	UU No. 29/1959 4 Juli 1959	1.648,04	ND	45,14	44	7	83	12	-	95
Wakatobi (Wanci)	UU No. 29/2003 18 Des. 2003	473,62	ND	-	142	8	75	25	-	100
Buton Utara (Buranga)	UU No. 14/2007 2 Januari 2007	1.923,03	ND	100-500	29	6	78	12	1	91
Buton Tengah (Labungkari)	UU No. 15/2014 23 Juli 2014	837,08	ND	7,94	13	7	67	10	-	77
Buton Selatan (Batauga)	UU No. 16/2014 23 Juli 2014	546,58	ND	6,69	5	7	60	10	-	70
Kota Baubau (Baubau)	UU No. 13/2001 21 Juni 2001	295,07	ND	133,31	13	8	-	43	-	43
Total		5.723,42	-	-	246	43	363	112	1	476

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (2020). Data diolah & dikonfirmasi dengan masing-masing dokumen Kabupaten/Kota dalam Angka, 2020.

Keterangan: *) Luas Daratan Menurut Data dari setiap Dokumen Kabupaten/Kota dalam Angka, Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan 2020; UPT = Unit Permukiman Transmigrasi yang Masih Menjadi Tanggung Jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Pembinaannya (Sumber: Kabupaten Buton Utara dalam Angka, Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan 2020).

lingkungan, dan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Memerhatikan kondisi fisik pemerintahan dan dominasi wilayah kepulauan, maka pembahasan modal kewilayahannya mencakup: keadaan geografis/topografis, wilayah administrasi pemerintahan dan batas-batasnya, serta keberadaan pelabuhan/bandar udara (bandara) sebagaimana disajikan **Tabel 2.a.**, **Tabel 2.b.**, dan **Tabel 2.c.**

Tabel 2.a. Membuktikan betapa luas dan kayanya calon Provinsi Kepulauan Buton yang memiliki 246 pulau dengan luas daratan yang mencapai 5.723,42 km². Amat disayangkan

karena belum tersedia data mengenai ukuran pasti luas wilayah laut dan panjang garis pantai yang kelak menjadi wilayah administrasi pemerintahannya. Dalam perspektif batas wilayah administrasi pemerintahan, kelak batas-batas wilayah administrasi pemerintahan calon Provinsi Kepulauan Buton didominasi wilayah laut/selat/perairan (**Tabel 2.b.**). Atas dasar hal tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di laut yang ada di wilayahnya sejauh 12 (dua belas) mil laut

Tabel 2.b.

Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Sebagai Modal Kewilayahannya Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Sebelah Utara	Sebelah Selatan	Sebelah Timur	Sebelah Barat
Buton	Kabupaten Buton Utara Kabupaten Muna Laut Banda	Kabupaten Buton Selatan Kota Baubau Laut Flores	Laut Banda Kabupaten Wakatobi	Selat Tiworo Kabupaten Muna Kabupaten Buton Tengah
Wakatobi	Laut Banda	Laut Flores	Laut Banda	Laut Flores Kabupaten Buton
Buton Utara	Selat Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Konawe Selatan	Kabupaten Buton	Laut Banda	Selat Buton Kabupaten Muna
Buton Tengah	Kabupaten Muna	Laut Flores	Kota Baubau	Kabupaten Bombana
Buton Selatan	Kota Baubau Kabupaten Buton	Laut Flores	Kabupaten Buton Laut Flores	Laut Flores
Kota Baubau	Kabupaten Buton	Kabupaten Buton Selatan	Kabupaten Buton	Selat Masiri Selat Buton Kabupaten Buton Tengah

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (2020). Data diolah & dikonfirmasi dengan masing-masing dokumen Kabupaten/Kota dalam Angka, 2020.

Tabel 2.c.

Keberadaan Pelabuhan dan Bandara Sebagai Modal Kewilayahan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

Posisi Wilayah Kerja UPP dan/atau Nama Pelabuhan			Bandara
Buton (10)	1. Pel. Banabungi 2. Pel. Bonelalo 3. Pel. Dongkala Pasar Wajo 4. Pel. Kamaru 5. Pel. Lasalimu	6. Pel. Lawele 7. Pel. Matanawue 8. Pel. Poreu 9. Pel. Wakalembe 10. Pel. Waoleona	-
Wakatobi (15)	1. Pel. Binongko 2. Pel. Kaledupa 3. Pel. Panggulu Belo Wanci 4. Pel. Papalia 5. Pel. Penyeberangan Wanci 6. Pel. Pulau Kapota 7. Pel. Pulau Runduma 8. Pel. Tomia	9. Pel. Waha/Ususku 10. Pel. Wanci 11. Dermaga Numana Desa Liya One Melangka 12. Dermaga Ambeua di P. Kaledupa 13. Dermaga Fery Kaledupa 14. Dermaga Fery Tomia 15. Dermaga Fery Binongko	Matahora (Bandara Domestik, Kelas III, UPT Ditjen Hubud Kemenhub)
Buton Utara (6)	1. Pel. Buranga 2. Pel. Ereke 3. Pel. Labuan	4. Pel. Labuan Belanda 5. Pel. Ngapea 6. Pel. Waode Buri/Lelamo	-
Buton Tengah (16)	1. Pel. Dongkala 2. Pel. Kolowa 3. Pel. Liana Banggai 4. Pel. Lombe 5. Pel. Madongkala 6. Pel. Mawasangka 7. Pel. Mawasangka Induk 8. Pel. Mone	9. Pel. Onewara 10. Pel. Talaga Besar 11. Pel. Talaga Raya 12. Pel. Tolandona 13. Pel. Wadiobero 14. Pel. Wajo GU 15. Pel. Wamengkoli 16. Pel. Wongko	-
Buton Selatan (6)	1. Pel. Batauga 2. Pel. Batu Atas 3. Pel. Kadatua Timur	4. Pel. Sampolawa 5. Pel. Siompu 6. Pel. Siompu Barat	-
Kota Baubau (5)	1. Pel. Baubau 2. Pel. Baubau/Murhum 3. Pel. Jembatan Batu	4. Pel. Lakologou 5. Pel. Penyeberangan Wara	Betoambari (Bandara Domestik, Kelas III, UPT Ditjen Hubud Kemenhub)
Total (58)	-	-	2

Sumber: 1. Statistik Transportasi Udara dan Laut Kabupaten Wakatobi (2018) dan BPS Kabupaten Wakatobi (2020)

2. Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi-Tenggara Bidang Kepelabuhanan (t.t.)

3. Ema (2019) dan BPS Kabupaten Wakatobi (2020)

Data diolah. 2020

diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan. Kewenangan tersebut meliputi: i) eksplorasi, eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; ii) pengaturan administratif; iii) pengaturan tata ruang; iv) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan v) ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Secara regulatif, kelak calon Provinsi Kepulauan Buton pun mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan setelah terlebih dahulu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah (Pusat).

Memerhatikan kewenangan yang diberikan kepada provinsi berciri kepulauan, maka perlu diketahui secara pasti panjang garis pantai maupun luas wilayah laut/selat/ perairan yang kelak akan menjadi batas wilayah sekaligus pagar imajiner Provinsi Kepulauan Buton. Pengukuran bertujuan untuk menjamin eksistensi kewilayahan beserta hak dan kewajiban daerah dalam tatanan

pemerintahan daerah, menegaskan batas-batas wilayah administratif pemerintahan, membentuk kesatuan masyarakat hukum, memberi kepastian berusaha/berinvestasi, dan mengoptimalkan potensi kewilayahan untuk kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan pulau-pulau dalam dominasi wilayah laut dan dinamika pembangunannya akan turut mengubah wajah kemaritiman di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Eksistensi pelabuhan (**Tabel 2.c.**) dan tingkat kemapanan aktivitasnya mampu menarik kunjungan kapal untuk singgah, memenuhi berbagai kebutuhan standar pelayanan kapal, dan melakukan embarkasi dan debarkasi penumpang/barang. Aktivitas kepelabuhanan ini akan menimbulkan dampak berganda (*multiplier effects*) berupa peningkatan produksi barang/jasa termasuk pengeluaran untuk konsumsi. Keadaan ini mampu mengakselerasi sirkulasi perekonomian di daerah.

Letak dan keberadaan pelabuhan di wilayah Kepulauan Buton dengan berbagai fasilitasnya menjadi titik labuh yang strategis. Keadaan ini dapat berimbang kepada

Tabel 3.

Posisi Strategis-Kompetitif Berdasarkan Modal Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Penduduk			ASN			Rasio ASN/ Penduduk (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Buton	59.997	58.265	118.262	1.491	1.426	2.917	2,47 (2,5)
Wakatobi	ND	ND	114.600	1.447	1.647	3.094	2,70 (2,7)
Buton Utara	ND	ND	66.291	1.176	1.138	2.314	3,49 (3,5)
Buton Tengah	59.248	58.818	118.066	986	1.014	2.000	1,69 (1,7)
Buton Selatan	49.788	48.489	98.277	1.104	935	2.039	2,07 (2,1)
Kota Baubau	ND	ND	157.911	1.868	2.371	4.239	2,68 (2,7)
Total/Rata-rata	169.033	165.572	673.407	8.072	8.531	16.603	2,47 (2,5)

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (2020). Data diolah & dikonfirmasi dengan masing-masing dokumen Kabupaten/Kota dalam Angka, 2020.

perubahan/penambahan rute/trayek maupun frekuensi kunjungan kapal yang semakin intensif. Frekuensi lalu lintas pelayaran nasional dan internasional yang semakin tinggi semakin cepat mengubah wajah kemaritiman di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Bagi wilayah kepulauan, dapat dipastikan keberadaan pelabuhan dan aktivitas kepelabuhanannya turut menstimulasi dinamika sosial, perubahan gaya hidup masyarakat, dan percepatan pembangunan, terutama kemajuan pembangunan pulau-pulau kecil dan wilayah kepulauan. Kapal sebagai moda transportasi laut/selat/perairan membutuhkan pelabuhan untuk proses embarkasi/debarkasi orang maupun barang. Posisi wilayah kepulauan Indonesia berada di antara ruang sediaan (*supply*) dari "Naga (Dragon)" di Utara (China) dan permintaan (*demands*) oleh "Kanguru (Kangaroo)" di Selatan (Australia). Keberadaan Kepulauan Buton di sisi Tenggara dan dalam perlintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III membentuk posisi strategis-kompetitifnya secara alamiah. Kelak, eksistensi Provinsi Kepulauan Buton memberi andil penciptaan peluang bisnis dan investasi asing secara langsung (*foreign direct investment*), pengembangan transportasi laut, peningkatan frekuensi perdagangan internasional dan kepariwisataan, bahkan memicu perkembangan industri manufaktur, seperti industri pembuatan/perawatan kapal, dan lain-lain.

Keberadaan seluruh modal kewilayahan di Kepulauan Buton ([Tabel 2.a](#), [Tabel 2.b](#), dan [Tabel 2.c](#)) merefleksikan pentingnya rentang

kendali wilayah kepulauan sekaligus mengindikasikan kesiapan Kepulauan Buton sebagai daerah otonomi baru. Kemapanan infrastruktur pelabuhan merupakan prakondisi mutlak bagi tempat persinggahan yang menguntungkan berbagai pihak karena membuka peluang produksi barang dan mengakomodasi kebutuhan konsumen. Mobilitas orang/barang termasuk pengiriman komoditas bahan pokok/perdagangan antarpulau mendatangkan manfaat dan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya.

Manusia sebagai modal utama pembangunan memiliki peran sentral. Dalam konteks modal manusia akan dibahas keberadaan penduduk yang nantinya menjadi kesatuan masyarakat hukum dan dibandingkan dengan eksistensi pegawai negeri sipil (PNS)/berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan merupakan unsur pelayanan masyarakat. Rincian jumlah populasi dan ASN disajikan pada [Tabel 3](#).

Data pada [Tabel 3](#) dibangun dengan asumsi bahwa: i) belum ada pegawai aparatur sipil negara (PASN) yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Buton; ii) tidak termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di masing-masing pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan iii) hanya mencakup pegawai negeri sipil (PNS) pada keenam wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota. Mengacu pada asumsi tersebut, maka rasio jumlah ASN terhadap jumlah penduduk di calon wilayah pemekaran Provinsi Kepulauan Buton berkisar 2,47 % atau 2,5 %. Hal ini dapat dimaknai bahwa setiap 100

Tabel 4.

Posisi Strategis-Kompetitif Berdasarkan Modal Sosial Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	IPM (Kondisi Tahun 2018)					TPT (%)	TPAK (%)	Jumlah Penduduk Miskin	Percentase Penduduk Miskin (%)
	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran (Ribuan Rupiah)	IPM				
Buton	67,60	13,53	7,50	7.209	65,08	1,29	65,44	13.970	13,65
Wakatobi	69,85	13,15	7,72	9.136	68,52	2,48	69,34	14.140	14,75
Buton Utara	70,56	12,74	8,54	7.393	67,13	2,70	71,74	9.180	14,38
Buton Tengah	67,33	12,35	7,28	7.160	63,46	4,22	66,80	14.640	15,77
Buton Selatan	67,33	12,56	7,07	7.192	63,47	3,77	64,82	11.810	14,66
Kota Baubau	70,72	14,80	10,13	10.374	74,67	5,84	66,12	12.420	7,27
Kep. Buton	-	-	-	-	-	3,38	67,38	76.160	11,31
Prov. Sultra	70,72	13,53	8,69	9.262	70,61	3,59	69,07	302.580	11,24
Indonesia	71,20	12,91	8,17	11.059	71,39	5,28	67,49	24.144.720	9,41

Sumber: BPS (2019a, 2019b, 2019c) dan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (2020). Data diolah, 2020.

orang penduduk di wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Buton akan dilayani oleh 2 (dua) orang sampai 3 (tiga) orang pegawai aparatur sipil negara (PASN).

Tentu saja hal ini relatif kurang ideal. Sebab, 1 (satu) orang ASN mendapat tugas memberi pelayanan kepada sekitar 50 penduduk. Terlebih di Kabupaten Buton Tengah yang hanya didukung oleh 2000 ASN, di mana aparaturnya memiliki jumlah paling sedikit bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Begitu pula bila dicermati secara demografis, banyaknya penduduk Kabupaten Buton Tengah menempati urutan ketiga yang mencapai jumlah 118.066 jiwa. Kondisi ini semakin tidak sepadan ketika melihat jangkauan wilayah geografis dan daya dukung sumberdaya aparaturnya, di mana Kabupaten Buton Tengah memiliki luas 837,08 Km² dan hanya didukung oleh 2000 ASN.

Keadaan ini menjadi semakin tidak realistik ketika dihadapkan kepada Kabupaten Wakatobi, di mana penduduknya mencapai 114.600 orang yang tersebar di 100 desa/kelurahan pada 4 (empat) pulau utama (P. Wangi-wangi, P. Kaledupa, P. Tomia, dan P. Binongko) dan beberapa pulau lainnya. Sekalipun Kabupaten Wakatobi memiliki 3.094 ASN disertai rasio ASN per jumlah penduduk mencapai 2,7%, namun mengingat kondisi wilayahnya berupa pulau-pulau yang tersebar dengan jarak antarpulauanya relatif berjauhan tentu berimplikasi terhadap pelayanan

maupun dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayah kepulauan.

Beragam faktor memengaruhi rasio ideal ASN per jumlah penduduk, terutama di wilayah kepulauan. Keadaan ini menjadi penyebab tidak ada patokan idealnya perhitungan rasio jumlah ASN terhadap jumlah penduduk yang harus dilayani. Sebab, selain jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis maupun topografis wilayah, keberadaan wilayah daratan (*mainland*) & kepulauan, keterjangkauan, maupun tingkat kesulitan mencapai suatu wilayahnya menjadi bahan pertimbangan yang tidak dapat diabaikan.

Patut diakui, belum terdatanya penduduk menurut jenis kelamin di beberapa kabupaten/kota. Selain itu, masih diperlukan tambahan pegawai untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan berkualitas. Hal ini terlihat dari rasio jumlah ASN per jumlah penduduk di masing-masing kabupaten/kota. Secara rata-rata, pelayanan terhadap 100 orang penduduk hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang ASN. Kondisi yang memerlukan perhatian adalah Kabupaten Buton Tengah, di mana 1 (satu) orang ASN melakukan pelayanan untuk 100 orang penduduk. Intervensi yang tepat adalah menerapkan teknologi, kreativitas, dan inovasi. Merespons prosesi pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, maka pemantapan modal manusia menjadi prioritas utama.

Modal sosial yang perlu dicermati agar keberadaannya bermanfaat bagi percepatan

pembangunan wilayah kepulauan adalah kapasitas penduduk yang dicerminkan melalui indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan keberadaan penduduk miskin. Perbaikan keempat komponen tersebut berimplikasi terhadap pencapaian tujuan ekonomi dan sasaran pembangunan. Posisi strategis-kompetitif dalam perspektif modal sosial disajikan pada [Tabel 4](#).

Memerhatikan [Tabel 4](#), terdapat 6 (enam) kabupaten yang memerlukan peningkatan IPM. Begitu pula dengan TPT, di mana masih terdapat 3 (tiga) orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di Kepulauan Buton karena tidak terserap pasar kerja. Intervensi IPM diperlukan untuk meningkatkan usia harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan jumlah pengeluaran per tahunnya. Kota Baubau memiliki IPM tertinggi, sedangkan Kabupaten Buton Tengah memiliki IPM terendah. Kolaborasi dan inovasi pemerintahan daerah melalui peningkatan standar akan mendukung peningkatan kualitas pendidikan seseorang, sehingga semakin memperluas peluangnya memeroleh pekerjaan yang baik. Implikasi, penerimaan pendapatan bertambah dan pengeluaran pun semakin meningkat. Begitu pula kehidupan seseorang semakin layak karena didukung oleh kesehatan yang lebih baik, sehingga memiliki hidup yang lebih lama.

TPAK adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK di Kepulauan Buton mencapai 67,38 persen. Hal ini mengindikasikan adanya 67,38 persen penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kepulauan Buton. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tingginya pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang/jasa dalam perekonomian di suatu wilayah.

Persoalannya, masih terdapat 11,31 persen atau 76.160 orang penduduk miskin di Kepulauan Buton. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di Kabupaten Buton Tengah, yaitu sebesar 15,77 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Kota Baubau, yaitu sebesar 7,27 persen. Dari sisi jumlah, penduduk miskin terbanyak masih berada di Kabupaten Buton Tengah (14.640 orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Kabupaten Buton Utara (9.180 orang). Kondisi ini dapat diatasi melalui kolaborasi antardaerah, sehingga lebih melancarkan proses pemekaran daerah.

Diketahui bahwa seluruh daerah di wilayah Kepulauan Buton memiliki budaya yang sangat luhur dan mulia. Memerhatikan keterbatasan data dan referensi pendukung yang dapat merepresentasikan budaya dari setiap kabupaten/kota, maka pembahasannya difokuskan kepada destinasi wisata yang memiliki relevansi dengan budaya/kebudayaan, keberadaan tempat peribadatan,

Tabel 5.

Posisi Strategis-Kompetitif Berdasarkan Modal Budaya/Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Destinasi Wisata					Jumlah Tempat Ibadah	Regulasi Terkait
	Budaya	Cagar Budaya	Religi	Sejarah	Kuliner		
Buton	6	-	-	3	-	182	Perda Kab. Buton No. 4/2015 Perda Kab. Buton No. 3/2017
Wakatobi	1	4	-	50	-	164	ND
Buton Utara	-	-	-	6	-	123	ND
Buton Tengah	-	-	-	-	-	107	ND
Buton Selatan	-	-	-	-	-	108	ND
Kota Baubau	5	-	-	27	-	181	ND
Total	12	4	-	86	-	865	-

Sumber: [BPS Provinsi Sulawesi Tenggara \(2020\)](#). Data diolah & dikonfirmasi dengan masing-masing dokumen Kabupaten/Kota dalam Angka, 2020.

Keterangan: Tempat peribadatan mencakup masjid, mushola, gereja Protestan, gereja Katolik, pura, dan vihara.

Tabel 6.

Posisi Strategis-Kompetitif Berdasarkan Modal Lingkungan/Alam Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kabupaten dan Kota	Nama	Dasar/ Waktu Penetapan	Luas (Ha.)	Kawasan Konservasi	
				Status Kawasan	Kondisi Ekologis/ Keanekaragaman Hayati
Buton	Kawasan Konservasi Perairan Kab. Buton	Belum diusulkan/proses penetapan	10.129,60	Berada di level merah. Perlu dilakukan percepatan/upaya pembenahan terhadap efektivitas pengelolaan Kawasan.	Bertopografi kasar mulai datar hingga berbukit dengan ketinggian bervariasi; Kemiringan lereng antara >50 - <450; Kondisi ekosistem pesisir menunjukkan adanya asosiasi 2 ekosistem pesisir, yakni hamparan lamun yang cukup luas pada kedalaman 0–3 m, sedangkan pada kedalaman 3–5 m merupakan hamparan karang yang sangat beragam, selanjutnya hingga kedalaman 15–20 meter merupakan wall, sehingga pola pertumbuhan karang berada pada dinding-dinding wall dengan tingkat kemiringan mencapai 90°.
Wakatobi	Taman Nasional Wakatobi	SK. Menhut No. 7661/Kpts-II/2002; Tgl. 19-8-2002	1.390.000,00	Perlu dukungan pembiayaan pengelolaan untuk mencapai tata kelola kawasan konservasi yang lebih efektif.	Bagian laut terdalam mencapai 1.044 m; Memiliki 25 buah Gugusan Terumbu Karang; Kelling pantai pulau-pulau karang 600 km; Lebih dari 112 jenis karang dari 13 famili; 93 jenis ikan hias; dll.
Buton Utara	-	-	-	-	-
Buton Tengah	Kawasan Konservasi Perairan Kab. Buton Tengah	-	109.069,55	-	Terdapat 5 jenis ekosistem lamun; Terdapat 7 jenis Mangrove dan tumbuhan semak yang berasosiasi dengan Kawasan Hutan Mangrove & beberapa tumbuhan Algae; Mayoritas karang adalah karang hidup, sisanya karang lunak dan karang mati.
Buton Selatan	Kawasan Konservasi Perairan Kab. Buton Selatan	-	174.504,74	-	Terumbu karang dapat ditemukan hampir semua lokasi kecamatan dalam wilayah KKPD Buton; Jenis terumbu karang tepi (<i>fringing reef</i>); Kedalaman ditemukan karang mulai 1 meter pada rataan terumbu (<i>reef flat</i>) hingga 25 meter pada lereng terumbu (<i>reef slope</i>); Kemiringan dasar perairan terumbu karang bervariasi, dari kemiringan 150 (landai) hingga 900 (<i>drop off</i>); Persentase penutupan karang hidup (<i>living coral</i>) secara keseluruhan rata-rata 29,78% tergolong kriteria sedang; Penutupan karang hidup tersebut di 20 lokasi pengamatan berkisar 2%-76,0% tergolong kriteria buruk hingga baik sekali. Terdapat 31 famili (suku) dan 188 jenis (spesies) ikan karang.
Kota Baubau	-	-	-	-	-
Total	3 KKPD & 1 TNL	-	1.683.703,89	-	-

Sumber: DKKJI (2015). Data diolah. 2020

dan regulasi yang mendukung pengembangan dan pelestarian budaya dan adat istiadat di setiap kabupaten/kota. Data rinci disajikan pada **Tabel 5**.

Berpredoman pada **Tabel 5**, hanya beberapa daerah yang memiliki destinasi wisata budaya menurut jenis wisata: budaya, cagar budaya, religi, sejarah, dan kuliner. Upaya pemajuan kebudayaan yang dilakukan secara masif, kolaboratif, dan terintegrasi antarpemangku kepentingan maupun lintas daerah menjadi agenda strategis demi lestariannya warisan leluhur Kesultanan Buton. Hingga saat ini, seluruh pemda telah memberi perhatian yang sangat intensif untuk pemajuan kebudayaan dan pelestariannya. Salah satu daerah yang memberi perhatian secara khusus melalui inovasi kebijakan adalah Kabupaten Buton. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Buton telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat. Selain itu, untuk pelestarian kebudayaan ditetapkan pula Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2021.

Kabupaten Wakatobi merupakan satu-satunya kabupaten yang menyediakan data kebudayaan dalam perspektif jenis wisata. Dokumen Kabupaten Wakatobi dalam Angka 2020 (**BPS Kabupaten Wakatobi, 2020, hlm. 243**) merekod potensi 632 obyek wisata yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Wakatobi. Dari sejumlah itu, terdapat obyek wisata budaya sebanyak 439 obyek, sedangkan 193 sisanya merupakan obyek wisata alam. Identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data modal budaya wajib diagendakan oleh

Tabel 7.a.

Posisi Strategis-Kompetitif Berdasarkan Modal Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kabupaten/Kota	APBD (Rp. Juta)	PAD (Rp. Juta)	% PAD/ APBD	Dana Perimbangan (Rp. Juta)	% DP/ APBD	Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPYS)	% LPYS/ APBD
Buton	750.934,59	19.157,62	2,55	620.293,40	82,60	111.483,57	14,85
Wakatobi	894.385,64	32.557,62	3,64	756.501,55	84,58	105.326,48	11,78
Buton Utara	653.364,27	16.727,38	2,56	551.170,59	84,36	85.466,30	13,08
Buton Tengah	630.089,76	29.630,69	4,70	530.686,90	84,22	69.772,17	11,07
Buton Selatan	562.285,92	5.749,37	1,02	483.260,78	85,95	73.275,77	13,03
Kota Baubau	896.384,74	75.717,00	8,45	740.127,58	82,57	80.540,17	8,99
Total	4.387.444,92	179.539,68	4,09	3.682.040,80	83,92	525.864,46	11,99

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (2020). Data diolah & dikonfirmasi dengan masing-masing dokumen Kabupaten/Kota dalam Angka, 2020.

seluruh pemda agar keberadaan modal budaya turut berkontribusi secara proporsional dalam pembentukan daerah otonom baru.

Eksplorasi posisi strategis-kompetitif modal lingkungan/alam ditinjau dari potensi wilayah perairan laut, khususnya kawasan konservasi. Keberadaannya berpotensi untuk produksi ekonomi demi kesejahteraan seiring dengan pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan sebagaimana diekspresikan dalam **Tabel 6**.

Selain keberadaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Taman Nasional Laut (TNL) yang luasnya mencapai 1.683.703,89 hektar, masih terdapat beragam kekayaan lingkungan/alam. Mengingat keterbatasan data, maka tidak dilakukan analisis dan dibahas. Terdapat pula kekayaan (*wealth*) yang akan diperoleh setelah terlebih dahulu dikelola/diproses/diubah, berupa optimasi kawasan pesisir di sepanjang garis pantai dan eksplorasi potensi pulau-pulau yang ada di wilayah Kepulauan Buton. Selain itu, masih terdapat potensi untuk memproduksi garam, penggalian bahan tambang, pemajuan kepariwisataan, kelautan dan perikanan, serta pengelolaan laut/perairan, pantai/pesisir, dan pulau-pulauanya. Kekayaan lingkungan dan dinamikanya mengindikasikan perlunya pengelolaan secara khusus melalui daerah otonom berskala provinsi.

Dalam konteks modal ekonomi, ditemukan sejumlah modal ekonomi di Kepulauan Buton. Berdasarkan posisi strategis-kompetitifnya dan memerhatikan keterbatasan data, maka analisis hanya dilakukan terhadap kondisi keuangan daerah yang ditinjau dari APBD dan

struktur keuangan yang membentuk APBD, yakni: PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana **Tabel 7.a**. Pengamatan dilakukan juga terhadap keberadaan perusahaan industri mikro dan kecil dan industri besar/sedang (jumlah, tenaga kerja, nilai investasi, dan nilai produksi) termasuk panjang jalan dan jumlah kantor bank (**Tabel 7.b**). Memerhatikan keberadaan Kepulauan Buton, dianalisis pula data kunjungan kapal, penumpang dan barang yang diangkut, produk domestik regional bruto (PDRB), dan laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana tabulasi **Tabel 7.c**.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu instrumen pengukur tingkat kemandirian daerah. Kemampuan daerah menghasilkan porsi PAD tinggi akan mengurangi ketergantungannya terhadap alokasi dana perimbangan (DP) yang disediakan Pemerintah (Pusat). **Tabel 7.a** menunjukkan kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten/kota di Kepulauan Buton yang berada di kisaran angka 1% hingga 9% pada TA. 2019. Begitu pula halnya dengan komponen pendapatan APBD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPYS) memiliki porsi kontribusi terhadap APBD sebesar 8% hingga 15%.

Setiap pemda berupaya mengidentifikasi dan mengukur potensi PAD-nya agar dapat mengupayakan peningkatannya. Peningkatan PAD dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sangat dimungkinkan melalui inovasi administrasi, inovasi manajemen, inovasi kebijakan, inovasi sosial, dan inovasi teknologi secara terintegrasi, bertahap, dan masif. Diperlukan

Tabel 7.b.

Posisi Strategis-Kompetitif Berdasarkan Modal Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Industri Mikro & Kecil				Industri Besar/ Sedang		Panjang Jalan (km)	Bank
	PIMK	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp. Ribu)	Nilai Produksi (Rp. Ribu)	IBS	Nilai Produksi (Rp. Ribu)		
Buton	775	3.526	94.392.240	195.795.360	1	14.788.223.170	1.102,61	9
Wakatobi	113	486	29.527.176	51.231.784	1	8.238.375.000	729,45	9
Buton Utara	359	1.654	35.288.824	78.646.216	-	-	1.293,58	4
Buton Tengah	215	995	21.234.300	47.323.200	1	2.374.000.000	323,56	3
Buton Selatan	240	1.094	42.484.824	80.110.216	-	-	614,35	3
Kota Baubau	1.312	6.256	147.853.304	318.592.536	6	26.002.262.000	462,03	22
Total	3.014	14.011	370.780.668	771.699.312	9	51.402.860.170	4.525,58	50

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (2020). Data diolah & dikonfirmasi dengan masing-masing dokumen Kabupaten/Kota dalam Angka, 2020.

cara-cara baru menstimulasi kesadaran publik dan menggugah partisipasi masyarakat agar bersedia membayar pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen utama PAD.

Dalam perspektif ekonomi, keberadaan jalan dan institusi keuangan (perbankan) menjadi salah satu faktor penentu tumbuhnya sektor industri. Secara rinci, jumlah perusahaan industri mikro dan kecil (PIMK), industri besar/sedang (IBS), panjang jalan (negara, provinsi, dan kabupaten/kota), dan kantor bank (milik negara dan swasta) disajikan pada **Tabel 7.b.**

Tabel 7.b. menunjukkan bahwa hadirnya 3.014 PIMK di Kepulauan Buton dengan kontribusi terhadap investasi di daerah sebesar Rp 370.780.668.000,00 dan berhasil membuka lapangan pekerjaan. Hal ini terlihat dari jumlah serapan tenaga kerjanya yang

mencapai 14.011 orang. Hasilnya pun memiliki nilai produksi tinggi, yakni mencapai Rp 771.699.312.000,00. Akumulasi total nilai produksi tersebut hampir mendekati nilai APBD Kabupaten Wakatobi dan APBD Kota Baubau Buton, tetapi masih lebih tinggi daripada nilai APBD Kabupaten Buton, APBD Kabupaten Buton Utara, APBD Kabupaten Buton Tengah, dan APBD Kabupaten Buton Selatan. Sebaliknya, aktivitas perindustrian dalam skala industri besar/sedang (IBS) hanya terdapat 9 (sembilan) perusahaan di Kepulauan Buton. Namun, dalam produksinya yang didukung hanya 367 tenaga kerja, IBS ini mampu menyumbangkan total nilai produksi sebesar Rp 51.402.860.170.000,00. Semakin baik bila tersedia data nilai investasi yang telah ditanamkan kesembilan perusahaan IBS tersebut. Keniscayaan ini mengingat

Tabel 7.c.

Posisi Strategis-Kompetitif Berdasarkan Modal Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Kunjungan Kapal (Unit)	Penumpang (Orang)		Barang (Ton)		PDRB ADHB (Rp. Juta)	LPE (%)
		Turun	Naik	Bongkar	Muat		
Buton	900	7.754	6.879	13.545	13.784	3.805.653,10	4,12
Wakatobi	3.265	109.350	101.763	97.344	18.066	4.356.687,77	6,60
Buton Utara	335	10.837	10.687	19.134	11.943	3.131.849,19	5,72
Buton Tengah	6.063	206.123	203.914	465.933	460.828	2.370.433,64	6,26
Buton Selatan	-	-	-	-	-	2.936.998,02	5,95
Kota Baubau	10.643	685.096	806.288	2.360.655	1.939.338	9.044.331,28	6,59
Total	21.206	1.019.160	1.129.531	2.956.611	2.443.959	16.601.621,72	6,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (2020). Data diolah & dikonfirmasi dengan masing-masing dokumen Kabupaten/Kota dalam Angka, 2020.

keberadaan institusi perbankan yang mencapai 50 kantor bank milik Pemerintah maupun milik swasta. Begitu pun dukungan fasilitas jalan yang relatif panjang dan memadai, sehingga melancarkan mobilitas dan transportasi barang secara langsung dari/ke lokasi PIMK maupun IBS bahkan dari/ke berbagai sentra perekonomian, tempat-tempat potensial dan lokasi strategis antarkota di Kepulauan Buton dan daerah lainnya.

Wilayah kepulauan sangat membutuhkan dukungan pelabuhan dan kelayakan moda transportasi laut. Kapal laut sebagai moda transportasi angkutan orang dan barang memiliki peran strategis. Kunjungan kapal dan muatannya di Kepulauan Buton, total produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB), dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) pada tahun 2019 diungkapkan dalam Tabel 7c.

Modal ekonomi pada **Tabel 7.c.** menunjukkan posisi strategis-kompetitif Kepulauan Buton sebagai jalur transportasi, distribusi logistik, perdagangan, dan perekonomian serta koridor penghubung Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) maupun lintasan pelayaran internasional Selatan-Utara di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III. Hingga kini terdapat 10 (sepuluh) armada kapal milik PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang melintas dan berlabuh di Pelabuhan Kota Baubau dan Pelabuhan Wanci Wakatobi, yakni: i) KM. Dobonsolo; ii) KM. Ciremai; iii) KM. Nggapulu; iv) KM. Sinabung; v) KM. Tidar; vi) KM. Dorolonda; vii) KM. Lambelu; viii) KM. Leuser; ix) KM. Sirimau; dan x) KM. Tilongkabila. Selain itu, terdapat pula route Kapal Perintis termasuk Kapal Ferry Cepat (KFC) Jetliner yang menghubungkan pulau-pulau di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kuantitas kapal dan tingginya frekuensi pelayaran berkontribusi terhadap distribusi orang/barang, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kecepatan pembangunan, dan laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Buton.

Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi setiap daerah relatif tinggi. Keadaan ini terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 4% hingga 7%. Berdasarkan eksistensi daerah otonom yang telah ada,

dengan asumsi kondisi lain-lain tetap dan dalam situasi normal, maka dapat diprediksi bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Buton dapat mencapai 6%. Keadaan ini sangat kondusif dan menjadi faktor pendukung bagi pembentukan daerah otonom baru Provinsi Kepulauan Buton.

C. Sumberdaya Nirwujud (*Intangible Resources*)

Data mengenai sumberdaya nirwujud sungguh langka/terbatas. Sumberdaya nirwujud yang dibahas adalah komunitas kreatif, yakni: pelaku usaha ekonomi kreatif (ekraf), kreativitas terutama porsi subsektor ekraf dalam pembangunan, inovasi daerah yang diciptakan, dan IoT yang disatukan dengan digitalisasi. Pada umumnya pelaku usaha kreatif memulai usahanya dari level industri mikro atau industri kecil (IMK). IMK adalah perusahaan industri dengan tenaga kerja antara 1-4 orang (industri mikro) dan 5-19 orang (industri kecil). Kegiatan utamanya menghasilkan produk barang/jasa dari 16 (enam belas) subsektor industri kreatif.

Dinamika pasar global telah membuka peluang bisnis baru yang bersifat masif dan berbasis ekonomi jingga (*orange economy*). Ekonomi kreatif sebagai talenta baru merupakan pengungkit daya saing suatu daerah. Ekonomi kreatif dalam kerangka ekosistemnya merupakan agenda strategis dan unggulan yang diharapkan mendominasi perubahan pola pikir dan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengelolaan pembangunan inklusif di wilayah kepulauan. Dalam studinya, **Sidauruk & Saksono (2018, hlm. 87-88)** menyatakan bahwa ekosistem ekonomi kreatif adalah seperangkat entitas yang saling terkait dalam kerangka pengaturan dan pengelolaan ekonomi kreatif agar tercipta produk (barang & jasa) kreatif yang berkualitas, bernilai tinggi, dan berkesinambungan. Ekosistem industri kreatif didefinisikan sebagai interaksi antarkomponen industri kreatif, yakni: a) gagasan; b) karya kreatif; c) tahapan produksi; d) komersialisasi; e) pengembangan; f) pengarsipan; g) publikasi; dan h) pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah, persebaran kemanfaatan yang semakin meluas, dan secara

simultan mendorong terciptanya kreativitas baru yang orisinal.

Keberadaan ekonomi kreatif menjadi strategi kompetitif peningkatan daya saing wilayah kepulauan. **Saksono (2012, hlm. 98)** menegaskan pengembangan ekonomi kreatif memerlukan keterlibatan pemda, terutama dalam perumusan regulasi/kebijakan agar dapat dilaksanakan secara simultan oleh para regulator, mediator, fasilitator, implementor, aktor, kreator, inovator (AKI), dan para penerima manfaat lainnya.

Mengacu data **Bekraf & BPS (2019, hlm. 59–60)** di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 60.130 usaha ekonomi kreatif (ekraf) dalam 5 (lima) bentuk usaha, yakni: i) 155 usaha berbentuk PT/Persero; ii) 198 usaha berbentuk CV; iii) 3.187 usaha dengan izin khusus; iv) 30 berbentuk Badan Usaha Lain; dan v) 56.560 tidak berbadan usaha. Kontribusinya dalam pembangunan daerah didasarkan porsinya, yakni: i) kuliner (61,47%); ii) fesyen (22,70%); iii) kriya (11,46%); iv) music (0,78%); v) arsitektur (0,59%); vi) fotografi (0,51%); vii) TV & Radio (0,17%); viii) seni rupa (0,13%); ix) app &

games (0,09%); x) penerbitan (0,09%); xi) seni pertunjukkan (0,07%); xii) film, animasi, & video (0,04%); xiii) desain interior (0,01%); xiv) periklanan (0,01%); xv) desain komunikasi visual atau DKV (0,01%); dan xvi) desain produk (0,00%).

Perbedaan semakin mencolok ketika merujuk data sebaran pelaku ekraf yang dijaring menggunakan *Bekraf Information System in Mobile Application* (BISMA) sampai 30 Juni 2019. Diperoleh total 64 pelaku usaha pada 16 subsektor ekraf di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kondisi ini harus segera dieksplorasi sebagai peluang bisnis dan investasi diwilayah Kepulauan Buton. Dinamika dan problematikanya merupakan posisi strategis-kompetitif bagi pengembangan Kepulauan Buton sebagaimana diungkap pada **Tabel 8**.

Patut diakui bahwa dari 64 pelaku usaha ekraf (BISMA), baru terdapat 14 pelaku usaha atau 21,87% yang menjalankan usahanya di wilayah Kepulauan Buton. Komposisi ini dapat dipastikan meningkat manakala seluruh pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi, menyusun kebijakan penguatan usaha ekraf, dan memberi insentif serta kemudahan yang

Tabel 8.
Posisi Strategis-Kompetitif Berdasarkan Sumberdaya nirwujud Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha Ekraf (BISMA)		Sub Sektor Industri Kreatif/ Komunitas Kreatif ^a	RKB ^b	Inovasi Daerah	IoT & Digitalisasi	
	Jumlah	Sebaran				K-ODP	S-T/I
Buton (Pasar Wajo)	1	1,56%	-	ND	ND	768	426
Wakatobi (Wanci)	-	-	Total UMKM (RKB) = 57 UMKM Unggulan = 0 Go Modern = 57 Go Digital = 25 Go Online = 17 Sektor Unggulan: Makanan & Minuman, Craft/Kerajinan Tangan, Fashion/Busana, Jasa, Industri.	RKB Wakatobi	ND	1.808	1.133
Buton Utara	1	1,56%	-	ND	ND	-	-
Buton Tengah	3	4,69%	-	ND	ND	-	-
Buton Selatan	-	-	-	ND	ND	-	-
Kota Baubau	9	14,06%	Total UMKM (RKB) = 122 UMKM Unggulan = 7 Go Modern = 122 Go Digital = 96 Go Online = 26 Sektor Unggulan: Makanan & Minuman, Craft/Kerajinan Tangan, Fashion/Busana, Lainnya, Industri.	RKB Baubau	ND	8.948	6.834
Total	14	21,87%					

Sumber: Berbagai sumber. Data diolah. 2020.

Keterangan: K-ODP = Kapasitas Optical Distribution Point; S-T/I = Sambungan Telepon/Internet; ND (No Data) = Tidak Ada Data;

^aRKB Wakatobi [PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk], <https://rkb.id/lokasi>

^bRumah Kreatif BUMN Telkom Baubau [PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk], <https://rkb.id/lokasi>

didukung stimulan anggaran bagi pengembangan usaha ekraf.

Memerhatikan besarnya peran industri kreatif, di wilayah Kepulauan Buton didirikan 2 (dua) rumah kreatif yang difasilitasi oleh badan usaha milik negara (BUMN) PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Rumah kreatif BUMN (RKB) merupakan rumah bersama untuk berkumpul, belajar dan membina para pelaku UKM menjadi UKM Indonesia yang berkualitas. RKB mendampingi dan mendorong para pelaku UKM dalam menjawab tantangan utama pengembangan usaha UKM dalam 3 hal, yakni: i) peningkatan kompetensi; ii) peningkatan akses pemasaran; dan iii) kemudahan akses permodalan. Saat ini, terdapat beberapa komunitas kreatif yang tersebar di Kepulauan Buton, di antaranya: Baubau Creative Forum (BBCF), Buton Kreatif, Buteng Kreatif, Busel Kreatif, Kepton Kreatif, dan Limbo Wolio Institute ([La Basisa, 2018](#)). Komunitas kreatif tersebut aktif berkolaborasi dengan RKB untuk mengetahui program terkini dalam upaya mengembangkan bisnisnya. Kondisi ini menjadi semakin ideal ketika Pemerintah Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan segera melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan potensi ekraf serta berkolaborasi dengan Kementerian BUMN membangun RKB di masing-masing kabupaten.

Inovasi daerah menjadi salah satu poin strategis-kompetitif dalam sumberdaya nirwujud. Dalam perspektif inovasi daerah, ternyata seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Buton belum melaporkan inovasi daerahnya. Amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah belum terlaksana. Bukti ketiadaan data inovasi tertera dalam Lampiran Hasil skor dan Status Inovasi Daerah Berdasarkan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018 yang dikirimkan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia melalui Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Nomor 002.6/3444/Litbang, tertanggal 22 Agustus 2019, Perihal Hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018.

Pembahasan IoT dan digitalisasi difokuskan kepada kapasitas *Optical Distribution point* (ODP) dan Sambungan

Telepon/Internet. ODP adalah sebuah perangkat pendukung layanan fiber optik yang berfungsi sebagai titik terminasi kabel drop optik atau tempat untuk membagi satu *core optic* ke beberapa pelanggan atau terminal ([Feibriawan, 2019, hlm. 30](#)). ODP menjadi salah satu alat produksi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan dan digitalisasi secara merata di seluruh wilayah. Kegunaan ODP adalah sebagai pembagi dari kabel distribusi ke titik rumah pelanggan (konsumen). Hingga saat ini, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan belum tersedia data sambungan telepon/internet dan kapasitas ODP-nya. Semakin banyak pengguna yang mencatu dari ODP, maka diperlukan kapasitas ODP yang semakin besar/memadai. Karenanya, kapasitas ODP menjadi penentu persebaran dan kekuatan jaringan serta kualitas layanan digital di wilayah kepulauan, terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal serta perbatasan antarnegara (3T-P). Kekuatan jaringan disertai layanan internet yang berkualitas dan murah membantu mempublikasikan keberadaan Kepulauan Buton, sehingga membuka akses kepada peluang bisnis dan memudahkan investor menanamkan modalnya. Perbaikan laman (*website*) resmi masing-masing pemda kabupaten/kota menjadi prasyarat utama. Patut pula menambahkan 3 (tiga) Bahasa pergaulan utama investor internasional, yakni: Inggris, Mandarin, dan Arab pada website resmi pemda.

Merespons pembentukan Provinsi Kepulauan Buton, posisi strategis-kompetitif dapat menginspirasi terciptanya *city branding* masing-masing kabupaten/kota. Adanya *city branding* atau citra dan karakteristik wilayah perkotaan akan mempercepat popularitas suatu wilayah. Atas pertimbangan tersebut *city branding* menjadi aspek strategis dan sangat kompetitif bagi upaya pembangunan yang berorientasi daya saing antarpulau maupun antarwilayah kepulauan. Pemekaran daerah semakin siap manakala *city branding*-nya dibangun berbasis ekosistem ekonomi kreatif dan ekosistem industri kreatif yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

IV. KESIMPULAN

Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton akan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya, sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Posisi strategis-kompetitif merupakan salah satu faktor penguat (*enabling factors*) yang semakin mengukuhkan pertimbangan akseleratif-komprehensif untuk segera membentuk sebuah provinsi baru yang berbasis wilayah kepulauan. Kesiapannya menjadi daerah otonom baru dibuktikan melalui keberadaan dan keanekaragaman sumberdayanya yang berlimpah dan mengindikasikan kondisi mustaid. Hal ini menjadi wujud garansi bahwa dengan dibentuknya Provinsi Kepulauan Buton akan tercipta perubahan, kemandirian, kecepatan merespons dan memperbaiki mutu layanan, penguatan *good governance*, peningkatan daya saing daerah, dan kesinambungan pembangunan. Kehadirannya menjadi pertimbangan yang membangun rasa percaya publik (*public trust*) bahwa pemekaran daerah Provinsi Kepulauan Buton sudah layak dan sepantasnya untuk segera direalisasikan menjadi daerah otonom baru dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

V. REFERENSI

- Bank for International Settlements. (2009). *Range of practices and issues in economic capital frameworks*. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/publ/bcbs152.htm>
- Bekraf & BPS. (2019). *Infografis Sebaran Pelaku Ekonomi Kreatif*. Bekraf & BPS.
- BPS. (2019a). *Indeks Pembangunan Manusia 2018*. BPS. <https://www.bps.go.id/publication/2019/08/27/34432798c6ae95c6751bfbb/a/indeks-pembangunan-manusia-2018.html>
- BPS. (2019b). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019* (56/07/Th. XXII; Berita Resmi Statistik). BPS. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>
- BPS. (2019c). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019* (91/11/Th. XXII; Berita Resmi Statistik). BPS. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html>
- BPS Kabupaten Wakatobi. (2020). *Kabupaten Wakatobi dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Wakatobi. <https://wakatobikab.bps.go.id/publication/2020/04/27/06b44dd4c3fa55ffb875a2f7/kabupaten-wakatobi-dalam-angka-2020.html>
- BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. (2020). *Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka 2020*. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. <https://sultra.bps.go.id/publication/2020/04/27/5d6105874c97770e01adea/c6/provinsi-sulawesi-tenggara-dalam-angka-2020.html>
- Chorafas, D. N. (2004). *Economic Capital Allocation with Basel II*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-6182-9.X5000-9>
- Dalziel, P., Saunders, C., Fyfe, R., & Newton, B. (2009). Sustainable Development and Cultural Capital. *Official Statistics Research Series*, 5, 1–41.
- Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi-Tenggara Bidang Kepelabuhanan. (t.t.). *Pelabuhan—Dinas Perhubungan Prov. Sultra Bidang Kepelabuhanan*. Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi-Tenggara Bidang Kepelabuhanan. <http://kepelabuhanan.sultraprov.go.id/pelabuhan.php?aksi=pelabuhan&&idpel=PEL00005>
- DKKJI. (2015). *Profil Kawasan Konservasi Provinsi Sulawesi Tenggara*. DKKJI.
- Ema. (2019, Agustus 28). *Hubungkan Pulau-pulau, Pemda Wakatobi Bangun 7 Pelabuhan*. Detiksultra.com. <https://detiksultra.com/2019/08/28/hubungkan-pulau-pulau-pemda-wakatobi-bangun-7-pelabuhan/>
- Febriawan, D. R. (2019). *Laporan Kerja Praktek di PT. Telkom Akses Yogyakarta* (hlm. 1–86). Universitas Atma Jaya. <http://ejournal.uajy.ac.id/18526/>

- Gogan, L. M. (2014). Human capital: The need to be evaluated. *Review of Applied Socio-Economic Research*, 7(1), 52–60. <https://ideas.repec.org/a/rse/wpaper/v7y2014i1p52-60.html>
- Hueting, R., & Reijnders, L. (1998). Sustainability is an objective concept. *Ecological Economics*, 27(2), 139–147. [https://doi.org/10.1016/S0921-8009\(98\)00033-0](https://doi.org/10.1016/S0921-8009(98)00033-0)
- Kurecic, P., Milkovic, M., & Kokotovic, F. (2017). An Introduction to Empiric Approach to the Resource Curse Phenomenon in Small Island Developing States (SIDS). *INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT*, 2(6), 6–14. <https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.26.2001>
- La Basisa. (2018, Juni 24). *Komunitas Pemuda Kreatif Kepton Ngumpul Bahas Permasalahan Ekraf*. Penasultra.com. <https://penasultra.com/komunitas-pemuda-kreatif-kepton-ngumpul-bahas-permasalahan-ekraf/>
- OECD. (2001). *The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital*. OECD Publishing. https://books.google.co.id/books?id=rkw2iCau_wUC
- Perret, C. (2014). *Social capital and viable territorial development in Kabylian communityThe central role of the regional identity*. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01094761>
- Saksono, H. (2012). Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 04(02), 93–104. <https://doi.org/10.21787/JBP.04.2012.93-104>
- Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Bina Praja*, 05(01), 01–12. <https://doi.org/10.21787/JBP.05.2013.01-12>
- Saksono, H. (2019). Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Penelitian & Pengembangan dan Desain & Inovasi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 213–226. <http://jkpjournal.kalselprov.go.id/index.php/menu/article/view/36>
- Sidauruk, R., & Saksono, H. (2018). Ekonomi Kreatif Sebagai Basis City Branding Menuju Kepariwisataan Terintegrasi di Kawasan Danau Toba. *Inovasi*, 15(1), 83–104. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i2.95>
- Smith, R., Simard, C., & Sharpe, A. (2001). *A Proposed Approach to Environment and Sustainable Development Indicators Based on Capital* (hlm. 1–21).
- Tóth, B. I. (2015). Territorial Capital: Theory, Empirics and Critical Remarks. *European Planning Studies*, 23(7), 1327–1344. <https://doi.org/10.1080/09654313.2014.928675>
- Towse, R. (Ed.). (2011). *A Handbook of Cultural Economics, Second Edition* (2 ed.). Edward Elgar Publishing. <https://www.elgaronline.com/view/9781848448872.xml>